

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik masih tergolong baru dalam bidang akuntansi di Indonesia tetapi telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam waktu yang singkat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh badan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Badan publik merangkul kebutuhan publik untuk mengelola anggaran mereka secara bertanggung jawab dan transparan.

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menjadi fokus perhatian publik saat ini, yang menuntut pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan benar dan realistis, dapat dipertanggungjawabkan secara luas atas hasil kinerja, untuk dilihat oleh publik. Agar kinerja suatu organisasi dapat mencapai hasil yang baik, maka harus diselaraskan dengan visi dan misi organisasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas yang harus diperhatikan (Mahsun, 2016). Untuk menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan/program, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga menilai apakah tingkat layanan yang disediakan pemerintah sepadan dengan uang yang mereka keluarkan untuk layanan tersebut.

Pengukuran kinerja yang baik bagi pemerintah adalah apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. menyatakan bahwa Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*argent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memegang hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas terdapat

kewajiban untuk melaporkan dan kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan semua tindak lanjut dan kegiatan di bidang administrasi kepada pihak yang lebih tinggi tingkatannya. akuntabilitas suatu instansi pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tujuan instansi tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, antara lain: (1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), (2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat BPKAD Pemrov Sumatera Selatan memegang amanat untuk mengelolakeuangan dan aset yang sejatinya rentan mengundang isu-isu yang baik, oleh karena itu BPKAD Pemrov Sumatera Selatan harus mempertahankan akuntabilitas demi pandangan baik publik atas kinerjanya. Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidaklah mudah. Ini memerlukan waktu yang lama serta usaha yang terus menerus. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo,2002).

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi terlihat dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dimana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat dan daerah hingga eselon II untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Daerah, UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang Transparansi Kegiatan dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi kepada pihak- pihak yang berwenang menerima pelaporan pertanggungjawaban/wali amanat (LAKIP 2020).

Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menemui berberapa isu-isu permasalahan diantaranya yaitu ada sebagian OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, adanya keterlambatan dalam pembahasan legislatif dikarenakan terlambatnya perencanaan program di OPD, Aset-aset seperti tanah di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum bersertifikat dan lokasi aset yang tersebar di wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan karena masih terdapat status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain, masih rendahnya realisasi penerimaan TP-TGR. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam peningkatan kinerja, karena dengan adanya akuntabilitas, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran akan tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. (LKjP 2021)

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak Publik dalam halnya pengelolaan datanya. Transparansi pada pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sebagai instansi pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemrov Sumatera Selatan dinilai memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan memberikan pelayanan yang baik secara akuntabilitas, transparan dan berkualitas.

Berdasarkan sistem pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja hibah belum memadai sehingga menurunkan kinerja dari BPKAD tersebut. Hal yang seharusnya dilakukan yaitu mengatur prosedur kerja terkait mekanisme verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban yg disampaikan para penerima hibah, dilakukan agar ada unit kerja atau personil yg ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam penatausahaan pertanggungjawaban hibah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah. (LHK 2020)

Penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah belum maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk Open Government Indonesia (OGI) adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat. (Bidang Sekretariat)

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan good governance yang

diterjemahkan sebagai “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Timbulnya konsep good governance karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik (Ibrahim, 2015). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Pengukuran kinerja dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan untuk memonitor dan memperbaiki kinerja yang berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi ketentuan akuntabilitas publik (Nordiawan & Hertianti, 2010).

Berdasarkan dari hasil penelaahan atas mekanisme pengajuan hibah dan pertanggungjawabannya diketahui bahwa BPKAD tidak melakukan penatausahaan pertanggungjawaban hibah, sehingga BPKAD tidak memiliki data tentang penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban dan pengembalian sisa hibah. Kepala BPKAD ternyata belum mengatur prosedur kerja terkait mekanisme verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan para penerima hibah. Pengaturan tersebut seharusnya dilakukan agar ada unit kerja atau personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam penatausahaan pertanggungjawaban hibah. (LHK 2020)

Penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 4 (empat) bidang dengan rincian bidang Akuntansi, Barang Milik Daerah, Perencanaan Penganggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah. Pada masa covid 19 saat ini maka besar kemungkinannya terjadi permasalahan dalam kinerja instansi yang mengakibatkan efektif atau tidaknya dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat perbedaan dengan penelitian

sebelumnya yaitu pada objek, populasi, tempat dan waktu yang berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas pula penulis tertarik untuk meneliti mengenai kinerja instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan variabel dependen yang akan diteliti yaitu akuntabilitas, transparansi, dan Responsibility dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, Terhadap Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan variabel yang diteliti dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas dan transparansi serta variabel independen yaitu kinerja instansi yang berada pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Populasi, sampel dan unit analisis pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode pada tahun 2022.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap kinerja instansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara bersamaan terhadap kinerja Instansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menjadi acuan agar pemerintah lebih fokus pada pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi untuk dapat meningkatkan Kinerja Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi instansi Pemerintahan dan menjadi masukan atas Kinerja Instansi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang kinerja pemerintah.
4. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.